BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Analisis referensi dan batasan pandangan menjadi krusial dalam Penelitian Sasaran Strategis Ditjen PPKL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir Laut sebagai penentu arah pembahasan. Penelitian ini akan memulai pembahasan dengan menyesuaikan definisi pengertian yang telah disampaikan dengan tema penelitian yang diangkat. Selanjutnya, akan diuraikan kajian referensi yang relevan guna memberikan landasan yang kuat dalam menggali lebih dalam aspek-aspek terkait dalam penelitian:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil
1.	Irman Firmansyah (2012) ***"Model Pengendalian Pencemaran Laut Untuk Meningkatkat daya Dukung Lingkungan Teluk Jakarta"***	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil pengujian menunjukkan model hubungan antara jumlah industri dan pasar dengan beban pencemaran efektif merefleksikan kondisi sistem nyata. Terjadi peningkatan beban pencemaran, khususnya limbah domestik, industri, dan pasar, menunjukkan hubungan positif antara populasi industri dan pasar dengan pencemaran. Meskipun ada penurunan beban karena partisipasi industri dan pasar serta meningkatnya kesadaran masyarakat, namun secara keseluruhan, beban pencemaran tetap meningkat. Struktur model dapat merepresentasikan fungsi sistem, dengan pertumbuhan penduduk memberikan kontribusi signifikan terhadap pencemaran Teluk Jakarta. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 berkontribusi sebanyak 27,09% terhadap pencemaran Teluk

No	Judul	Metode	Hasil
			Jakarta. Upaya penanggulangan limbah domestik diharapkan dapat diantisipasi pada tahun tersebut dengan dukungan kebijakan. Diharapkan penanggulangan limbah domestik dapat diantisipasi pada tahun 2015, tergantung pada dukungan kebijakan. Untuk industri, diharapkan kontribusi pencemaran dapat diatasi pada tahun 2014, dan pencemaran limbah pasar dapat semakin menurun dan teratasi pada tahun 2016, seiring dengan peningkatan kesadaran lingkungan dan implementasi dokumen lingkungan.
2.	Tomy Palijama (2021) **"*Perlindungan Hukum Wilayah Pesisir di Negeri Batu Merah Damer, Kabupaten Maluku Barat*"**	Metode Normatif Kualitatif	Dalam konteks pencemaran laut, senyawa kimia berbahaya yang berbentuk partikel kecil dapat diserap oleh plankton dan hewan dasar laut. Hewan-hewan ini sebagian besar berperan sebagai filter feeder. Melalui proses ini, zat beracun yang ada di dalam perairan dapat terbawa ke dalam rantai makanan, meningkatkan risiko akumulasi racun dalam rantai tersebut. Dalam kasus lain, partikel kimia tersebut dapat bereaksi dengan oksigen, mengakibatkan perairan menjadi kurang oksigen (anoksik). Mayoritas sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik melalui tertiup angin, terhanyut oleh aliran air, atau melalui tumpahan. Berdasarkan UU Pasal 10 ayat 1, di dalam domain perlindungan wilayah pesisir dan pengendalian pencemaran, dinyatakan "Setiap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang berpotensi mencemari laut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan guna mencegah terjadinya pencemaran laut". "Dampak pencemaran laut yang terjadi pada kapal KM Lestari Permai III di Desa Batumerah, Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya telah dibahas melalui perbincangan antara warga setempat dan

No	Judul	Metode	Hasil
			beberapa instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup di daerah Maluku Barat Daya. Salah satu dampak yang muncul adalah pencemaran oleh minyak, yang disebabkan oleh kapal yang tidak beroperasi lagi dan dibiarkan begitu saja oleh pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kapal tersebut. Pencemaran yang meluas di laut dapat memiliki dampak serius terhadap biota laut. Pengaruh minyak terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar perairan wilayah pesisir menjadi sangat signifikan. Selain itu, perlu dicatat bahwa logam berat juga dapat menjadi sumber pencemaran. Logam berat didefinisikan sebagai benda padat atau cair yang memiliki berat 5 gram atau lebih per cm3, dengan logam yang beratnya kurang dari 5 gram dikategorikan sebagai logam ringan.”. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat tentang pentingnya terumbu karang dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan terumbu secara lestari merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Kesadaran ini mencakup pemahaman peran krusial terumbu karang, seperti dalam pengembangan wisata bahari dan pemanfaatan sebagai sumber bahan baku obat-obatan. Fokus utama adalah menanamkan pemahaman tentang terumbu karang bagi kehidupan, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelestarian terumbu karang.
3.	Imam Fahcruddin (2020) ***“Sosialisasi Dan Partisipasi Penanggulangan Pencemaran Laut Bagi***	Metode Observasi Turun Lapang	Sosialisasi dan partisipasi dalam upaya penanggulangan pencemaran laut di masyarakat pesisir pantai Desa Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dilaksanakan selama dua hari pada 16-17 November 2019. Pemberian santunan kepada anak yatim piatu di sekitar pantai

No	Judul	Metode	Hasil
	Masyarakat Pesisir Pantai Di Desa Tanjung Pakis Kabupaten Karawang Barat"		Tanjung Pakis menjadi puncak acara, yang melibatkan penyuluhan mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan pesisir, pembagian kaos, dan alat kebersihan kepada warga, serta kolaborasi dalam membersihkan pantai. Kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut dapat disimpulkan dari antusiasme peserta saat sosialisasi dan partisipasi aktif dalam membersihkan pantai. Penting untuk menjaga momentum positif ini dengan mengimplementasikan kegiatan berkelanjutan, seperti pendirian bank sampah. Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, tetapi juga nilai jual bagi masyarakat setempat.
4.	Izza M Apriliani (2017) ***"Aksi Bersih Pantai Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran Pesisir Pantai Pangandaran"***	Metode Observasi dengan Pendekatan Deskriptif	Melibatkan partisipasi sukarelawan, aksi pembersihan pantai atau Coastal Cleanup adalah bagian dari inisiatif global untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan. Sukarelawan bekerja sama dalam melakukan pembersihan pantai dengan menerapkan metode survei untuk mencapai tujuan kebersihan lingkungan. Umumnya, kegiatan ini tidak hanya dilakukan dipesisir pangandaran saja namun kegitan ini berlangsung di seluruh dunia secara bersama-sama dan dikenal dengan sebutan International Coastal Cleanup (ICC). Partisipasi dalam kampanye kebersihan pesisir pantai juga memberikan peluang bagi masyarakat, wisatawan, dan relawan Indonesia. Sebagai suatu konsep kegiatan, ICC terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran pesisir pantai. Hal ini dicapai melalui pengalaman survei langsung dan partisipasi aktif dalam pengambilan sampah. Menurut Ohkura (2007), kegiatan ini memberikan beberapa aspek

No	Judul	Metode	Hasil
			pebgfetahuan kepada peserta yakni: “ 1) Sampah yang mencemari pesisir pantai berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat, yang dibuang melalui sungai atau saluran lainnya. 2) Setiap individu menghasilkan sampah yang mudah terlihat dan sudah menjadi hal yang biasa. 3) Solusi terbaik adalah membentuk komunitas masyarakat yang peduli dan terampil untuk mencegah pencemaran serta mengembangkan kesadaran masyarakat akan praktik daur ulang.”
5.	Aries Dwi Susanto (2016) ***“Permasalalahan Dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Sampang”***	Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologi	Permasalahan di Kabupaten Sampang melibatkan kebutuhan lahan, overlapping wilayah, pencemaran, degradasi lingkungan, dan zonasi. Kebutuhan lahan terkait pembangunan Jembatan Suramadu meningkat, memicu konversi lahan, dan reklamasi. Dampaknya termasuk kerusakan ekosistem mangrove, biaya tinggi untuk melindungi infrastruktur pesisir. Reklamasi dan konversi lahan di Kecamatan Camplong menjadi solusi alternatif. Kecamatan Camplong mengalami abrasi pantai, membahayakan infrastruktur seperti jalan raya utama. Overlapping pemanfaatan wilayah disebabkan oleh kepentingan ekonomi, mempengaruhi ketersediaan lahan. Konversi hutan bakau yang seharusnya melindungi pantai beralih fungsi untuk pemukiman dan industri.Permasalahan lain melibatkan tumpang tindih penangkapan ikan, potensi limbah industri, dan akumulasi limbah laut, meningkatkan degradasi lingkungan. Revaluasi zonasi pemanfaatan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dalam RTRW di wilayah pesisir. Kabupaten Sampang memiliki potensi garam, wisata bahari, budaya laut, dan industri terpadu.Usaha tambak garam, baik tradisional maupun modern,

No	Judul	Metode	Hasil
			dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Manajemen yang baik meningkatkan kesejahteraan. Tambak garam juga dapat menjadi ikon wisata di Madura secara umum dan di Sampang khususnya.

2.2 Kerangka Teori

Penelitian mengenai Sasaran Strategis Ditjen PPKL Dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir Laut membutuhkan analisis referensi dan pembatasan pandangan sebagai elemen penentu arah pembahasan. Pengertian dan definisi terkait disesuaikan dengan tema penelitian yang sedang diangkat. Dalam konteks ini, kami akan membahas kajian referensi yang relevan untuk mendukung pembahasan penelitian:

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu proses yang berkelanjutan, dan oleh karena itu sangat penting untuk memahami tahapan-tahapan dalam siklus tersebut. Siklus kebijakan mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan dirumuskan dengan tujuan tertentu, dan keberhasilannya tergantung pada hubungannya dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan publik secara umum didefinisikan sebagai langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. Proses politik dalam sistem pemerintahan suatu negara menghasilkan kebijakan publik sebagai hasilnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah

sebagai penyelenggara negara harus menjalankan langkah-langkah atau upaya tertentu. Dalam konteks ini, birokrasi yang merupakan aparat pemerintah, memainkan peran dan fungsi integral dalam implementasi kebijakan publik.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, kebijakan bukan hanya melibatkan aparatur negara tetapi juga merupakan instrumen pemerintah. Pengambilan keputusan dalam kebijakan mencakup "pengaturan langsung terhadap manajemen dan distribusi SDM, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat umum, seperti rakyat, penduduk, atau warga negara". Interaksi kompleks antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang mencerminkan struktur politik suatu negara menjadi bagian integral dari proses kebijakan. Kebijakan publik mencakup rentang tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah (Dye, 2005). Tindakan atau usaha untuk memengaruhi sistem guna mencapai tujuan yang diinginkan bersifat strategis, dengan fokus pada aspek jangka panjang dan menyeluruh (Suaib, 2016).

Suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi masalah, melaksanakan kegiatan, atau mencapai tujuan tertentu adalah esensi dari kebijakan. Langkah ini dijalankan oleh instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan tugas administratif serta mengembangkan kemajuan bangsa. Dunn (1994) menyatakan bahwa "sistem kebijakan melibatkan tiga unsur utama, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Interaksi saling ketergantungan antara ketiga

komponen ini tercermin dalam tatanan kelembagaan yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik, dan interaksi unsur-unsur kebijakan". William Dunn, seperti yang dijelaskan dalam Ayuningtyas (2014:16), menyebutkan hal sebagai berikut:.

a. Konteks kebijakan (*policy environment*) merujuk pada latar belakang khusus di mana sebuah kebijakan berkembang, dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan dan kebijakan publik itu sendiri.
b. Individu memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut disebut sebagai pelaku atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*). Para pemangku kepentingan kebijakan dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti "warga biasa, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainy".
c. Esensi kebijakan (*policy content*) melibatkan sejumlah alternatif keputusan terkait urusan publik, termasuk opsi untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan apapun, yang disiapkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi kebijakan memberikan respons terhadap sejumlah isu publik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, mencakup pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan bidang-bidang lainnya.

Proses formulasi kebijakan melibatkan sejumlah langkah, seperti "pengaturan pengembangan kebijakan, identifikasi permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, pemilihan opsi, evaluasi opsi, perputaran untuk penelaahan sejawat, revisi kebijakan, dan upaya memperoleh dukungan resmi". Kebijakan publik sendiri bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat.

2.2.2 Strategi

Sebagai cara untuk mencapai sasaran, strategi adalah suatu pendekatan menyeluruh yang melibatkan pelaksanaan ide, perencanaan, dan eksekusi kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Marrus seperti yang dikutip dalam penelitian oleh Eva Fauzia (2019), strategi didefinisikan sebagai "proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang melibatkan penyusunan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut". Strategi, menurut pendapat David (2016) dapat dianggap sebagai seni dan ilmu dalam mengevaluasi, mengimplementasikan, dan merumuskan keputusan lintas fungsi dengan tujuan mencapai target organisasi.

a. Secara umum

Strategi merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dalam sebuah organisasi dalam menetapkan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dalam proses ini, terdapat fokus yang diberikan pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selain itu, strategi juga melibatkan penyusunan

langkah-langkah atau upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Secara khusus

Strategi merupakan serangkaian tindakan yang terus-menerus dan berkelanjutan, diarahkan pada peningkatan bertahap, dan dilakukan dengan memperhatikan pandangan tentang keinginan pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, strategi dipandang sebagai upaya yang dimulai dari antisipasi terhadap kemungkinan kejadian di masa yang akan datang, bukan berdasarkan pada kejadian yang sedang terjadi.

Strategi merujuk pada sebuah rangkaian rencana atau tindakan yang disusun dan dipersiapkan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan di masa depan. Diciptakan dengan tujuan mencapai target yang diinginkan oleh individu atau kelompok tertentu, strategi mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Koteen dalam Salusu (2015) mengidentifikasi beberapa jenis strategi, termasuk yang antara lain:

a. Strategi Organisasi

Strategi Organisasi, atau Corporate Strategy, mencakup perumusan misi, visi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategis. Diskusi-diskusi strategis memainkan peran kunci dalam menetapkan arah strategi, memastikan pemahaman mendalam tentang lingkungan organisasi, dan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan. Dengan fokus pada elemen-elemen ini, strategi

organisasi menjadi panduan terintegrasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan membangun keberlanjutan.

b. Strategi Program

Strategi ini menitikberatkan pada pemahaman konsekuensi program-program khusus yang diterapkan oleh suatu organisasi. Strategi program tidak hanya mempertimbangkan dampak langsung dari program tersebut, tetapi juga mencakup bagaimana dampak tersebut akan memengaruhi tujuan keseluruhan organisasi. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan mencapai sasaran yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi program tidak hanya bersifat responsif terhadap dampak program sebelumnya, tetapi juga merupakan perencanaan baru yang mendukung tujuan organisasi secara menyeluruh.

c. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas kinerja organisasi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Sumber daya yang dimaksimalkan melibatkan aspek manusia, seperti peningkatan keterampilan dan pengembangan personel, keuangan untuk memastikan keberlanjutan operasional, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi lainnya. Dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif, strategi ini bertujuan

untuk memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan mutu kinerja secara keseluruhan.

d. Strategi Kelembagaan

Strategi Kelembagaan merupakan pendekatan untuk memperkuat kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan inisiatif-inisiatif strategis. Strategi ini tidak hanya mempertimbangkan pengembangan organisasi secara menyeluruh, melainkan juga pemberdayaan individu-individu yang terkait dalam struktur organisasi. Pemberdayaan ini melibatkan regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tanggung jawab dan kewenangan di dalam suatu organisasi. Keseluruhan strategi ini menitikberatkan pada aspek kelembagaan untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan inisiatif-inisiatif strategis yang diambil oleh organisasi. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kerangka kerja yang kuat dan mampu merespons tantangan serta peluang yang muncul dengan efektif. Keberhasilan strategi kelembagaan dapat diukur dari sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan unsur-unsur kelembagaan yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan mencapai tujuan strategisnya (Salusu, 2015).